

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman didalam berbagai aspek kehidupan, buktinya adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia, tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia, dan tidak ada satu masyarakatpun yang tidak memiliki kebudayaan, begitu pula sebaliknya, tidak akan ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat.

Melihat realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural maka akan terlihat pula adanya berbagai suku Bangsa di Indonesia, tiap Suku Bangsa inilah yang kemudian mempunyai ciri khas kebudayaan yang berbeda-beda, sebagai mana kita ketahui, Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keanekaragaman Budaya hal itu bisa dilihat dari beragamnya Komunitas Adat Terpencil yang hampir tersebar di berbagai pulau di Indonesia.

Berbicara tentang Budaya itu tidak terlepas dari keberagaman Adat Terpencil yang dimiliki Bangsa ini, dalam kenyataanya wacana tentang Komunitas Adat Terpencil seringkali menjadi perbincangan di Negara ini, mulai dari isu permasalahan yang menyeruak kepermukaan, ketidakadilan

dan kurangnya perhatian dari pihak Pemerintah di Negara ini. Sebagaimana menurut Kepres No. 111/ 1999¹, komunitas adat terpencil adalah: Sekelompok sosial Budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi maupun politik, adanya pengakuan dari Pemerintah berupa pengakuan akan eksistensi komunitas adat terpencil, pengakuan terhadap hak sosial dan ekonomi, pengakuan terhadap perlindungan Tradisi dan Adat Istiadat dan pengakuan terhadap program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui produk hukum Nasional maupun daerah yang melindungi hak-hak masyarakat Adat Terpencil serta kewajiban Negara mengakui dan melindungi hak-hak komunitas masyarakat Adat Terpencil.

Merujuk Kepres tersebut, Pemerintah sudah selayaknya berperan penting terhadap keberadaan mereka, karena bagaimanapun Komunitas Adat merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya yang dimiliki Bangsa ini dan perlu diperhatikan keberadaanya, selain itu merupakan bagian dari keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kenyataannya kondisi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pola berpikir yang relatif stagnan menjadikan Komunitas Adat Terpencil menjadi daerah yang jauh tertinggal dari pada masyarakat pada umumnya, perkembangan semakin lambat tatkala masyarakat Komunitas Adat Terpencil sulit berkomunikasi dengan dunia luar, meskipun demikian

¹ [http://katcenter.info/artikel.id-ar=65.uapaya perlindungan terhadap KAT](http://katcenter.info/artikel.id-ar=65.uapaya%20perlindungan%20terhadap%20KAT). 21.03.2008.

kehidupan mereka sangatlah teratur dengan tetap memegang teguh norma-norma yang mereka miliki.

Dari sekian banyak keaneka ragaman Suku Bangsa dengan macam-macam Agama yang dianut, Bagasa, logat, Budaya, serta watak yang sukar difahami oleh orang lain yang berasal dari komunitasnya adalah merupakan warisan kekayaan yang sangat berharga, Tradisi Budaya sebagai warisan Nenek Moyang yang terdapat di beberapa perkampungan Adat yang berada hampir di setiap pulau di Negara ini yang hingga kini tetap dipertahankan.

Tradisi dan pola kehidupan suatu Komunitas Adat setempat yang hingga kini tidak terhimbas oleh arus globalisasi dan transformasi yang telah melanda kehidupan masyarakat pada umumnya, hal itu menunjukkan betapa kuatnya para tokoh Adat dan masyarakat mempertahankan Budaya sebagai warisan Nenek Moyang yang harus dilestarikan. Selain itu kemajuan jaman tidak mempengaruhi banyak dalam pola kehidupan masyarakat walaupun peradaban telah bergeser seiring perubahan jaman, namun secara filosofis tetap mengikuti ajaran Nenek Moyang.

Berbicara komunitas Adat Terpencil di Indonesia, ada salah satu Komunitas Adat Terpencil yaitu Komunitas Adat Baduy yang merupakan Komunitas Adat yang berada di pulau Jawa yang mana tepatnya berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Komunitas Adat Baduy memiliki karakteristik yang membedakan dengan Komunitas Adat lainnya dan selalu memegang teguh budaya yang mereka anut, keunikan dan

karakteristik ini tercermin dari kebudayaan yang mereka miliki, baik dari segi Agama, mata pencaharian, kesenian dan lain sebagainya.

Komunitas Adat Baduy yang terletak di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mendesak Pemerintah untuk menindak tegas para penebang kayu di hutan lindung atau hutan larangan, yang mana menurut mereka kegiatan penebangan liar tersebut mengganggu kelestarian yang mana akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan mereka, selain itu menurut mereka kegiatan tersebut dinilai sudah melecehkan atau mengusik kehidupan mereka. Mereka berharap, Pemerintah Pusat maupun Daerah bisa menegakan hukum secara adil dan bijaksana. “Kita tidak butuh bantuan rumah, pangan, ataupun pakaian, kita hanya perlu hukum saja ditegakan, agar adat istiadat yang kami dijunjung tinggi dapat dipelihara dengan baik dan tidak terusik” Ujar Kepala Desa Kanekes (Jaro Dainah)².

Melihat fenomena yang terjadi diatas, hendaknya Pemerintah Daerah berperan penting dalam menjaga kelestarian Komunitas Adat tersebut dengan mengedepankan semangat Otonomi Daerah dan berpedoman kepada Kepres No 111/1999. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal ini hendaknya mampu menjaga dan melindungi aset-aset Budaya Daerah yang dimiliki, karena Komunitas Adat Baduy merupakan suatu aset Budaya yang dimiliki Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang harus dijaga dan dilestarikan.

² <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0406/18/jab02.html.pemberdayaanKAT.16.11.2008>.

Mengingat begitu pentingnya melestarikan aset-aset Budaya yang kita miliki dengan mengedepankan semangat Otonomi Daerah, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis tentang **“Bagaiman Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Dalam Menjaga Kelestarian Komunitas Adat Baduy”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

”Bagaiman Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Dalam Menjaga Kelestarian Komunitas Adat Baduy Tahun 2006-2008”

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dalam menjaga kelestarian Komunitas Adat Baduy.
- b. Sebagai bentuk uji materi terhadap apa yang selama ini penulis peroleh didalam dunia akademik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam fokus kajian yang ada dalam penelitian.
- b. Manfaat teoritis dari penelitian adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dikalangan Universitas, khususnya dikalangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh kesarjanaan dalam ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu Pemerintahan, konsentrasi manajemen publik.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Untuk lebih lanjut mengenai urusan masalah tentunya akan berpijak pada suatu teori, untuk menunjang dalam pemecahan masalah penelitian maka diperlukan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang telah meneliti masalah-masalah yang hampir sama atau serupa agar penelitian tidak menyimpang dari sisi ilmiah dan kaedah-kaedah yang

berlaku, teori juga dalam suatu penelitian menjadi hal yang sangat penting sehingga permasalahan yang akan diteliti tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan teori adalah yang saling berhubungan menurut aturan logis menjadi bentuk pernyataan sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah, yang mana pengertian teori menurut Koenjtoroningrat³ adalah:

”Teori merupakan pernyataan sebab akibat atau mengenai suatu hubungan positif atau suatu gejala yang diteliti dengan suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”

Sedangkan menurut Masri Singarimbunan dan Sofyan Efendi⁴ teori yaitu:

”Serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”

Sehingga menurut definisi tersebut di dalam suatu penelitian harus mencakup beberapa hal yaitu:

1. Serangkaian proporsi anatar konsep-konsep yang saling berhubungan.
2. Menerangkan sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana caranya.

Melihat pengertian yang ada, maka dapat dikatakan teori adalah suatu kemungkinan detail sebagai permulaan atau pernyataan sebab akibat dari gejala yang diteliti, oleh karena itu dalam penelitian ini dasar-dasar teori yang digunakan meliputi:

³ Kontjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta 1991, hal 11.

⁴ Masri Singarimbunan dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Surfey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 4.

1. Peran Pemerintah

a. Peranan

Berbicara mengenai peranan, hal ini berkaitan dengan seseorang individu, lembaga atau organisasi dalam usahanya menjalankan fungsi utamanya. Sedangkan pengertian peranan dalam kamus bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa peranan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.⁵

Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Peran atau peranan dapat juga diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok dengan yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Beberapa pengertian peranan diantaranya:

1) Menurut WJS. Purworatminto.⁶

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 667.

⁶ WJS. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 735.

2) Sedangkan menurut Astrid S. Susanto.⁷

- a. Peranan adalah meliputi bagian-bagian yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, peranannya dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas-tugasnya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya tujuan yang telah ditentukan.

b. Peran Pemerintah.

Peran pemerintah adalah mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan para pegawai negeri baik jasmani maupun rohani, atau membantu warga Negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁷ Astrid S. Susanto, *Penagntar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal 95.

Fungsi dasar pemerintah menurut Anerson seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani yaitu⁸:

1. Menyediakan infrastruktur.
2. Menyediakan barang-barang dan jasa publik.
3. Menyelesaikan konflik-konflik anatar kelompok.
4. Menumbuhkan dan memlihara kompetisi.
5. Menjaga kelestarian sumberdaya.
6. Menjaga agar setiap warga Negara memiliki atau mempergunakan barang dan jasa publik taraf minimal yang dibutuhkan.
7. Menjaga stabilitas ekonomi

Dari beberapa fungsi diatas, paling tidak ada tiga fungsi peran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu⁹:

1. Fungsi Pengaturan (*Regulasi*)

Merupakan fungsi Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Fungsi regulasi atau pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan.

⁸ Sri Mulyani, *Peran Pemerintah Dalam Mekanisme Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap*, Fisip UMY, Yogyakarta, 2001, hal 8.

⁹ Owen E. Hughes, *Public Manajemen And Administration and Introduction*, Martin Press, London, 1994, hal 88-119.

Namun di samping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif juga lembaga departemen maupun non departemen. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan kepada masyarakat.

2. Fungsi Pemberdayaan (empowerment)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan Pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum sosial Budaya dan sebagainya.

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat pemerintah perlu diperdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum ekonomi, dari aparat Pemerintah perlu dimantapkan sehingga Pemerintah bisa memberdayakan masyarakat,

karena upaya pemberdayaan ini tidak terlepas dari aspek imitasi dan keteladanan dari aparat Pemerintah sendiri.

3. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan ini merupakan fungsi esensial dari Pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, baik oleh birokrasi pada tingkat pusat maupun Daerah. Fungsi pelayanan merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a. Menjamin keamanan Negara.
- b. Memelihara ketertiban.
- c. Menjamin penerapan keadilan.
- d. Pekerjaan umum dan pelayanan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Memenerapkan kebijakan ekonomi.
- g. Memelihara sumberdaya lingkungan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk

oleh Negara, yang mempunyai peran tugas dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Tugas-tugas tersebut baik berupa penyediaan sarana dan prasarana, barang dan jasa publik, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat. Sehingga dengan demikian peranan Pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan permasalahan di Daerah yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari Pemerintah itu sendiri yaitu dengan fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah¹⁰. Ketentuan tentang Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32/2004. berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang No.32/2004 adalah mendorong untuk memperdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran-peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

¹⁰ Undang-Undang Otonomi Daerah 2004.

Oleh karena itu UU No. 32 / 2004 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membantu dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas adalah keleluasan Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar Negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, Agama, serta kewenangan dalam bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.¹¹

Sedangkan Otonomi yang nyata adalah keleluasan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan pada Daerah dalam

¹¹ Dedi Supriadi B.ph.D, Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Tujuan dari adanya Otonomi Daerah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek :

- a. Dari segi politik otonomi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan Nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Dalam hal ini ada kesetaraan dan partisipasi politik. Ini juga merupakan media politik untuk belajar berdemokrasi secara nyata.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, otonomi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyediaan pelayanan publik.
- c. Dari segi kultural, otonomi dimaksudkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan atau kontekstualitas suatu daerah seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, Kebudayaan atau pun latar belakang sejarahnya.
- d. Dari segi pembangunan, otonomi dapat melancarkan proses formulasi dan implementasi program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga.¹²

¹² Joseph Riwu Kaho, *Otonomi daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDA Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 21

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah :

1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang di dasarkan di daerah Kabupaten dan daerah Kota.
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, daerah Kabupaten, daerah Kota dan Desa.

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Gubernur yang bertanggung jawab pada DPRD Provinsi, sedangkan kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab pada Presiden. Sedangkan untuk otonomi di Daerah Kabupaten dipimpin oleh Bupati atau Walikota yang bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah dan pimpinan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewajiban umum dan menyelenggarakan segala kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas pembinaan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Bupati adalah :

- b. Pimpinan Daerah yang harus membina seluruh perangkat Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah.

- c. Perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengadilan penyelenggaraan kewenangan Daerah.
- d. Pengkoordinasian tugas instansi vertikal yang ada di Daerah.

Di dalam sebuah penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuan yang telah dimiliki oleh Daerah agar dapat menghasilkan sumber keuangan sendiri dan potensi di daerahnya tersebut termasuk di dalam pengaplikasian dalam wujud pembangunan yang nyata. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah menjadi wewenang Daerah.

3. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Dinas Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian kebijakan dan pelaksanaan pelayanan umum.

- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas daerah terdiri dari :

- a. Kepala Daerah.
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan.
- c. Bidang yang membawahi seksi sebagai unsur pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) bidang dan 1 (satu) bagian Tata Usaha.
- b. Bagian tata usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 2 seksi.
- c. Masing-masing bidang membawakan sebanyak-banyaknya 2 seksi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

4. Budaya

Kata “*Kebudayaan*” berasal dari kata sangsekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “Budi” atau akal. Dengan demikian ke-Budaya-an dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal”.¹³

Dalam pemakaian sehari-hari perkataan ” Kebudayaan” berarti kualitas yang wajar yang dapat diperoleh dengan mengunjungi cukup banyak sandiwara dan konser tarian dan mengamati karya seni pada

¹³ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 181.

sekian banyak gedung kesenian. Tetapi seorang ahli antropologi, mempunyai definisi yang lain. Dalam ringkasan berikut ini Ralph Linton Menjelaskan bahwa :

“ Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Dalam arti cara hidup masyarakat itu kalau Kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan main piano atau membaca karya sastrawan terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial, kegiatan seperti main piano itu, merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan Kebudayaan kita. Keseluruhan ini mencakup kegiatan-kegiatan duniawi seperti mencuci piring dan menyetir mobil dan untuk tujuan mempelajari Kebudayaan, hal ini sama derajatnya dengan “ hal-hal yang lebih halus dalam kehidupan”. Karena itu, bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau perorangan yang tidak berKebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai Kebudayaan, bagaimanapun sederhananya Kebudayaan itu dan setiap manusia dalam mahluk berBudaya, dalam arti mengambil bagian dalam sesuatu Kebudayaan”.¹⁴

Para sarjana antropologi yang biasa menanggapi suatu Kebudayaan (Misalnya Kebudayaan Manangkabau, Kebudayaan Bali, atau Kebudayaan Jepang) sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi,

¹⁴ Ralph Linton, *The Cultural Background of Personality* (New York : Appleton-century-Croft, 1945). hal 30.

pada waktu analisa membagi keseluruhan itu kedalam unsur-unsur besar yang disebut “ Unsur-unsur Kebudayaan universal” atau”cultural Universals. Ada tujuh unsur Kebudayaan universal yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap Kebudayaan di dunia, adalah :¹⁵

1. Bahasa.
2. Sistem pengetahuan.
3. Organisasi sosial.
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi.
5. Sistem mata pencaharian hidup.
6. Sistem religi.
7. Kesenian.

Tiap-tiap unsur Kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam tiga wujud keBudayaa terurai diatas, yaitu wujudnya yang berupa sistem Budaya, yang berupa sistem sosial, dan yang berupa unsur-unsur Kebudayaan fisik. Dengan demikian sistem ekonomi misalnya mempunyai wujudnya sebagai konsep-konsep, rencana-rencana, kebijaksanaan, adat istiadat yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi mempunyai juga wujudnya yang berupa tindakan-tindakan dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak, pedagang, ahli transport, pengecer, dengan konsumen, dan kecuali itu

¹⁵ Ibid, hal 98-100.

dalam sistem ekonomi terdapat juga unsur-unsurnya yang berupa peralatan, komoditi, dan benda-benda ekonomi. Demikian juga sistem religi misalnya mempunyai wujudnya sebagai sistem keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan, Dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, sorga dan sebagainya, tetapi mempunyai juga wujudnya yang berupa upacara-upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang kadangkala, dan kecuali itu setiap sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-benda suci dan benda-benda religius. Contoh lain adalah unsur universal kesenian yang dapat berwujud gagasan-gagasan, ciptaan-ciptaan pemikiran, cerita-cerita dan syair-syair yang indah. Namun kesenian juga dapat berwujud tindakan-tindakan interaksi berpola antara seniman pencipta, seniman penyelenggara, sponsor kesenian, pendengar, penonton, dan kosumen hasil kesenian. Tetapi kecuali itu semua kesenian juga berupa benda-benda indah, candi, kain tenun yang indah, benda-benda kerajinan, dan sebagainya.

Ketujuh unsur Kebudayaan universal itu masing-masing tentu juga mempunyai wujud fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik keseluruhan dari satu unsur Kebudayaan universal. Itulah sebabnya Kebudayaan fisik tidak perlu diperinci menurut keempat tahap perincian seperti yang dilakukan sistem Budaya dan sistem sosial. Namun semua unsur Kebudayaan fisik sudah tentu secara khusus terdiri dari benda-benda Kebudayaan.¹⁶

¹⁶ Ibid, hal 24

Banyak Kebudayaan mempunyai suatu unsur Kebudayaan atau beberapa pranata tertentu yang merupakan suatu unsur pusat dalam Kebudayaan, sehingga digemari oleh sebagian besar dari warga masyarakat, dan dengan demikian mendominasi banyak aktivitas atau pranata lain dalam kehidupan masyarakat.

5. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

a. Menurut Oka A. Yeti

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan bukan untuk menikmati perjalanan tersebut tetapi untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam.¹⁷

b. Menurut UU No 9 Tentang Kepariwisataan

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, objek-objek, daya tarik wisata serta usaha yang lain terkait dibidang tersebut.¹⁸

Dengan demikian pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar tempat tinggalnya aktifitas dilakukan selama mereka tinggal yang dituju dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¹⁷ Oka Yeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa Bandung, 1987, hal 103.

¹⁸ Undang-undang tahun 1990, *tentang kepariwisataan*.

2. Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata dalam pembangunan mencakup beberapa segi yaitu:

a. Segi Ekonomi

Bahawa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut memperluas dasar-dasar perekonomian suatu Negara.

b. Segi Seni dan Budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu Daerah adalah untuk memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi atau menyelami seni Budaya yang dikunjungi.

c. Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Pembangunan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya apabila dibina secara baik justru jadi pendorong pemeliharaan lingkungan yang baik, atau pun dapat memanfaatkan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan rekreasi menginginkan Daerah yang memiliki suasana baru serta lingkungan yang bersih dan sehat.

d. Memperluas Nilai Pergaulan Hidup dan Pengetahuan

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, serta penyerapan pengetahuan baru.

4. Sasaran Pariwisata

Pada dasarnya sasaran pariwisata ditunjukkan kepada masyarakat umum tanpa memandang status sosialnya dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan suasana lain dari rutinitas sehari-hari. Sasaran pariwisata bagi masyarakat umum ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Bagi wisatawan dalam negeri (wisatawan domestika)

Bahwa sasaran pariwisata ini khusus ditujukan bagi masyarakat di dalam Negeri itu sendiri.

b. Bagi masyarakat luar negeri (wisatawan manca negara)

Bahwa sasaran pariwisata ditujukan bagi pariwisata manca Negara agar mereka tertarik untuk datang dan berkunjung, tentunya dengan menonjolkan kelebihan suatu objek wisata.

6. Baduy

Kata Baduy berasal dari kata Badwi dalam bahasa Arab atau berasal dari sebutan Cibaduy (sebutan aliran sungai di Desa Kanekes) maupun berasal dari sebuah nama gunung Baduy¹⁹. Selain itu kata Baduy merupakan bentuk sebutan atau gelar yang diberikan masyarakat luar Baduy kepada suku pedalaman yang tinggal di Desa Kanekes.

Istilah Baduy merupakan sebutan yang sudah ada sejak lama dan merupakan sebutan untuk seluruh warga Kanekes yang memeluk ajaran Sunda Wiwitan yang membedakan komunitas lain diluar Baduy, selain itu terdapat pula pendapat istilah kata Baduy yang di sebutkan oleh kokolot (sesepuh) warga Kanekes yang dikutip dari catatan R. Suryadiredja yaitu²⁰:

- Baduy (kata Baduy) diberikan untuk sebutan sebuah nama sungai yang melintas di perkampungan tersebut yang diberi nama Cibaduy.
- Istilah Baduy mungkin berasal dari kata BUDHA yang berubah ejaan menjadi Baduy.
- Sebutan Baduy dikaitkan karena adanya sebuah pohon yang sangat langka di daerah Gunung Kendeng dan diberi nama pohon baduyut.

¹⁹ Ahmad yani S.sos, *etnografi suku Baduy*, himpunan pramuwisata Indonesia, banten, 2008, hal 8.

²⁰ Wawancara dengan abah Mursid selaku masyarakat Baduy 15 januari 2009.

- Istilah Baduy juga diberikan oleh orang islam ketika Agama Islam telah memasuki wilayah Banten pada abad ke XV yang dibawa Sunan Gunung Jati melalui pantai utara Cirebon menuju ujung barat pulau Jawa yang mengepung kerajaan padjajaran yang pada waktu itu lokasinya berada di kawasan Bogor dengan Senapatinya Prabu Sedah yaitu putra dari Raja Prabu Siliwangi yang tidak mau memeluk Agama Islam.

Namun demikian hingga kini belum ada kepastian bukti yang kuat dari mana sebenarnya asal usul dan istilah nama Baduy tersebut, tapi yang jelas Baduy merupakan sebuah suku pedalaman yang berada di Pegunungan Kendeng daerah Kanekes Kabupaten Lebak, dan selalu memegang teguh adat istiadatnya yang senantiasa menjadi prinsip hidup mereka sejak dulu hingga kini dan dimasa yang akan datang yang hingga kini masih terjaga.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual adalah usaha untuk memperjelas pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi *over laping* atau kesalahan memahami konsep yang akan dikemukakan.

1. Peran suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh suatu individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga yang melaksanakan

tugas di sertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan.

2. Pemerintah Daerah adalah bagian dari Pemerintahan suatu Negara yang berdaulat yang dibentuk secara politik berdasarkan suatu undang-undang yang mempunyai lembaga-lembaga/badan-badan yang menjalankan roda Pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaannya.
3. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris daerah. Secara umum Dinas Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata sehingga orang tertarik untuk mengunjunginya.
5. Budaya adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide/gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, Kebudayaan itu bersifat abstrak.

6. Baduy adalah suatu suku atau komunitas adat yang berada di pedalaman Pegunungan Kendeng Kabupaten Lebak yang sampai saat ini selalu memegang teguh adat istiadatnya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Yang dimaksud dari definisi operasional penelitian ini adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan tahun pengukuran suatu variabel mencapai tujuan penelitian. Untuk penelitian tentang peran dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lebak dalam menjaga kelestarian Komunitas Adat Baduy, diperlukan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Peran Pengaturan (Regulasi)

- Peraturan Daerah No 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy
- Peraturan Daerah No 13 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat Masyarakat Baduy.

2. Peran Pemberdayaan (Epowerment)

- Program pemberdayaan Adat.
- Program Desa Budaya.
- Program Pengembangan Kerajinan Masyarakat Baduy.

3. Peran Pelayanan.

- Program Pengamanan Teknis Wilayah Ulayat Baduy
- Program pelayanan kesehatan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa Penelitian deskriptif kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²¹

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebak, khususnya di Dinas Budparpora Kabupaten Lebak dan di kawasan perkampungan Baduy, dengan alasan bahwa suku Baduy adalah suku yang berada di Kabupaten Lebak dan keberadaannya harus diperhatikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lebak.

²¹ Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

3. Unit Analisa

Yang dimaksud dengan unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisa adalah Dinas Budparpora Kabupaten Lebak dan perkampungan Baduy. Adapun unit analisa data yang dijadikan sumber data adalah:

- 1) Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Lebak.
- 2) Sub bidang Budaya dan bidang Pariwisata Dinas Budparpora Kabupaten Lebak.
- 3) Kepala Desa Kanekes
- 4) Masyarakat Baduy.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber yang langsung berhubungan dengan penelitian ini dan mampu memberikan informasi, meliputi kepala Dinas Budparpora Kabupaten Lebak beserta staf, Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwi Damar dan Masyarakat Baduy.

b. Data sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari surat kabar, majalah, bulletin, maupun arsip-arsip lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang dikumpulkan dalam objek penelitiannya maka penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview/ wawancara

Adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung (tatap muka) dengan aktifitas yang dihadapi oleh penyusun dan responden baik lisan maupun tulisan, yang mana tentang permasalahan yang berkaitan akan didapatkan sebagai bahan informasi yang berhubungan dengan subjek penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan Dinas Budparpora Kabupaten Lebak, Kepala Desa Kanekes dan Masyarakat Baduy.

2. Observasi

Adalah mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terjun langsung kelapangan pada objek yang sedang diteliti guna mendapatkan data yang diperlukan. Subjek pengamatan ini dilakukan secara sistematis dan diusahakan untuk mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasikannya.

3. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pembacaan terhadap berbagai pustaka, koran/majalah, literatur, arsip-arsip, perundang-undangan, peraturan daerah (Perda), dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sehingga analisa tersebut berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada.

Data yang diperoleh di lapangan penelitian dikelompokkan kemudian dipilih hal-hal pokok, penting, dicari pola atau temanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah dalam mengumpulkan data pada langkah selanjutnya dan menghindari data yang masih tumpang tindih.

Data yang masih tertumpuk dan tidak teratur dikumpulkan dalam bentuk yang teratur sehingga lebih mudah dibaca dan dimengerti. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan.

Berdasarkan uraian diatas maka teknik analisis data pada penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi.

b. Penilaian Data

Penilaian data dilakukan terutama bagi data sekunder, diman dalam penelitian deskriptif yang pada umumnya berkait dengan validitas dan objektifitas data. Sedangkan untuk data primer tidak terlalu mempermasalahkan hal diatas sehingga untuk memenuhi dua hal diatas dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengkatagorikan antara data sekunder dan data primer. Kedua, melakukan reduksi atas relevansi dengan topik penelitian.

c. Interpretasi data

Data yang sudah dinilai diatas kemudian diinterpretasikan dan direduksi sesuai dengan hal-hal yang diharapkan dari penelitian ini dengan dasar teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian.

d. Generalisasi

Generalisasi atau penerikan kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan berdasarkan interpretasikan data. Kemudian diberikan beberapa komentar terhadap hasil kesimpulan, sehingga diharapkan akan menambah wawasan teoritis atau bias memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan tujuan penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Dasar Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Mendeskripsikan tentang Kabupaten Lebak, Dinas budparpora Kabupaten Lebak dan suku Baduy.
- Bab III Membahas tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Dalam Menjag Kelestarian Komunitas Adat Baduy Diantaranya: Peran Pengaturan, Peran Pemberdayaan, dan Peran Pelayanan.
- Bab IV Kesimpulan dan Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.